

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

## Komisi A Desak Anies Sediakan Internet Gratis

JAKARTA-Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggendeng penyedia jasa layanan telekomunikasi (provider). Kolaborasi itu diperlukan supaya pelajar SD, SMP dan SMA/SMK di Jakarta terutama yang tidak mampu dapat mengikuti pelajaran secara gratis melalui daring (online).

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, mengatakan usulan itu sudah dia sampaikan saat berkunjung ke ruang kerja Anies belum lama ini. Saat itu, politisi dari Partai Demokrat tersebut datang bersama Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso dan anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI yang lain.

"Ada beberapa poin yang kami usulkan, dan akan selalu dikawal. Salah satunya, Demokrat DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan provider untuk meringankan tarif internet bagi siswa di DKI Jakarta, kalau bisa

gratis," kata Mujiyono di Jakarta. Menurutnya, paket internet merupakan salah satu yang dikeluarkan para orang tua. Selain biayanya cukup besar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, kondisi ekonomi warga Jakarta juga tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

"Selama pandemi digratiskan nggak apa-apalah, kan perusahaan telekomunikasi sekarang lagi berjaya, pasti ada celah menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan kemanusiaan dalam bentuk bantuan pendidikan. Salah satunya adalah mendukung pembelajaran jarak jauh itu," jelas Mujiyono.

Dia mencontohkan, paket kuo-

ta internet 20 gigabyte seharga Rp10.000, atau kalau memungkinkan digratiskan. Kata dia, di beberapa negara maju ada program berupa student price, yakni paket internet dengan harga pelajar.

"Padahal itu negara kapitalis, masa di negara Pancasila kayak kita yang semangatnya semangat gotong royong, tidak tumbuh tepedulian," untkapnya. Karenanya, dia berharap perusahaan provider bisa terketuk hatinya untuk membantu pendidikan di Jakarta. Dia yakin, pejabat perusahaan provider itu bisa berhasil mencapai puncak karir karena adanya pendidikan yang baik.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang meminta legal opinion dari lembaga vertikal. Pendapat hukum itu diperlukan supaya proses penganggaran dana bantuan uang pangkal sekitar Rp

247 miliar kepada pelajar di sekolah swasta akibat gagal masuk di sekolah negeri tidak bermasalah.

"Ini sedang dikoordinasikan dulu dengan Kejaksaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kepolisian," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan Suharli.

Ali mengatakan, pendapat hukum dari lembaga vertikal itu diperlukan karena DKI berencana akan membantu 126.011 pelajar memakai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Harapannya, pelajar yang gagal masuk sekolah negeri dan terdampak adanya wabah Covid-19 bisa terbantu untuk melanjutkan pendidikannya.

"Semua siswa yang tidak lolos PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) itu harus dibantu, karena mereka itu terdampak Covid-19 dan kondisi ekonomi keluarganya lagi tidak bagus," ujar Ali. (dni)